

21. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Ranwal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahan) dan Renja Provinsi (Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahn dan Renja Satpol PP Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – TenggerSemeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55);
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024. |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun |

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian anantara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat dalam *Tabel 2.1* sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25	-	81,25	85,60	105,35	81,50	81,50	99,09
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	-	100 %	100%	100	100 %	100 %	100
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 dokumen	-	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	20 dokumen	50
1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	14 dokumen	50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	112,5 %	112,5	100 %	106,25 %	106,25
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	-	44 orang/bulan	44 orang/bulan	100	45 orang/bulan	89 orang/bulan	49,44
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	-	4 laporan	5 laporan	125	4 laporan	9 laporan	56,25
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	-	100 %	143,98 %	143,98	100 %	121,99 %	121,99
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	22,22
1.05.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 orang	-	54 orang	41 orang	75,93	45 orang	86 orang	47,78
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	94,74 %	94,74	100 %	97,37 %	97,37

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	-	-	-	5 paket	5 paket	25
1.05.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	-	-	-	-	5 paket	5 paket	25
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	12,5
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	12,5
1.05.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184 laporan	-	46 laporan	45 laporan	97,83	46 laporan	91 laporan	49,46

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	-	-	-	-	6 unit	6 unit	33,33
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	-	-	-	-	24 laporan	24 laporan	25
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 laporan	-	-	-	-	24 laporan	24 laporan	25
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	-	30 unit	30 unit	100	38 unit	38 unit	126,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	5 unit
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 unit	-	2 unit	2 unit	100	1 unit	3 unit	5 unit
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39 %	-	94,38 %	93,59 %	99,31	95,64 %	95,64 %	95,64
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04 %	-	93,74 %	94,20 %	100,49	95,06 %	95,06 %	95,06
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
		Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	80 %	-	20 %	62,05 %	310,25	20 %	20 %	82,05
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1393 kasus	-	-	-	-	2017 kasus	2017 kasus	144,79

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan perkara melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1385 kasus	-	-	-	-	1929 kasus	1929 kasus	139,28
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	48 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	25
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	180 orang	-	41 orang	41 orang	100	45 orang	86 orang	47,78
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	25
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48 laporan	-	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	18 laporan	37,50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	48 laporan	-	12 laporan	28 laporan	233,33	12 laporan	40 laporan	83,33
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 laporan	-	12 laporan	16 laporan	133,33	12 laporan	28 laporan	58,33
1.05.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	37 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	2,70
1.05.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	46 unit	-	-	-	-	10 unit	10 unit	21,74
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.05.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.04.2.02.02	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	100 %	-	20 %	53 %	265	20 %	73 %	73
1.05.04.2.04.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	560 orang	-	100 orang	100 orang	100	140 orang	240 orang	42,86

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94,38 %	93,59 %	99,31 %
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	94,74%	94,74%

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga akibatnya target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Belum adanya peraturan walikota tentang pelaksanaan Perda No 1 tahun 2017.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100 %
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %
4.	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	100 %
5.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100 %	100 %
6.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	100%	100 %	100 %
7.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	100 %	100 %
8.	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100 %	100 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	81,25	85,60	105,35 %
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	93,74 %	94,20 %	100,49 %
3.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	112,5 %	112,5 %
4.	Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	143,98 %	143,98 %
5.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 %	62,05 %	310,25 %
6.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	20 %	53 %	265 %

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	√	-	4,39 %	6,40 %	8,68 %	11,40 %	4,36 %	6,40 %	8,68 %	11,40 %	Realisasi capaian tahun 2022 masih dibawah target
2.	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	-	-	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	91 %	92 %	93 %	Realisasi capaian tahun 2022 diatas target
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	√	94,38 %	95,64 %	96,89 %	98,14 %	93,89 %	95,64 %	96,89 %	98,14 %	Realisasi capaian tahun 2022 masih dibawah target
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	√	93,74 %	95,06 %	96,39 %	97,71 %	94,20 %	95,06 %	96,39 %	97,71 %	Realisasi capaian tahun 2022 diatas target
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi capaian tahun 2022 sesuai target
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	√	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,13 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Realisasi capaian tahun 2022 diatas target
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	√	-	100 %	100 %	100 %	100 %	94,67 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi capaian tahun 2022 masih dibawah target
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	√	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi capaian tahun 2022 sesuai target
9.	Persentase penurunan pelanggaran Perda	-	-	2,01 %	3,87 %	5,92 %	8,06 %	2,04 %	3,87 %	5,92 %	8,06 %	Realisasi capaian tahun 2022 diatas target
10.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	84	85,25	85,35	85,37	85,85	85,25	85,35	85,37	Realisasi capaian tahun 2022 diatas target

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung *Misi ke 1* “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan “, *Tujuan ke 1* “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis “, *Sasaran ke 2* “ Meningkatkan ketertiban umum” dan *Misi ke 4* “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, *Tujuan ke 3* “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup “, *Sasaran ke 5* “Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana “. Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda dan perkara di Kota Blitar;
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar;
- ❖ Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;
- ❖ Penanganan kejadian kebakaran belum optimal;
- ❖ Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran belum optimal;
- ❖ Terbatasnya ketersediaan anggaran.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
- ❖ Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran;
- ❖ Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
- ❖ Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;
- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;

- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku di Kota Blitar sehingga masih sering terjadi pelanggaran perda di Kota Blitar.
2. Belum optimalnya penindakan atas pelanggaran Perda dan Perkada dikarenakan regulasi yang berlaku sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
3. Masih rendahnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi dalam upaya cipta kondisi dan penjagaan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum di Wilayah Kota Blitar terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
4. Masih minimnya pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan Masyarakat (satlinmas) dalam penyelenggaraan perlindungan Masyarakat terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
5. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Belum optimalnya penerapan standar operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Masih belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku serta optimalisasi penindakan atas pelanggaran Perda dan Perkada
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait review beberapa regulasi sesuai pemetaan kondisi dan aturan yang berlaku
3. Penyelenggaraan kegiatan cipta kondisi dan penjagaan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum di Wilayah Kota Blitar secara intensif baik secara mandiri maupun bersama perangkat daerah lintas sektor.
4. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan Masyarakat (satlinmas) secara intensif menyambut penyelenggaraan perlindungan Masyarakat terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Melaksanakan updating penerapan standar operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kondisi terkini.
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara bertahap.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah menentukan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
2. Transformasi Ekonomi sebagai akibat dampak COVID - 19;
3. Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bersih berbasis Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam *Tabel 2.3* sebagai berikut .

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	6.053.123.546,-	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	6.084.537.148,-	
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>100 %</i>	<i>20.405.300,-</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>100 %</i>	<i>20.405.300,-</i>	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.106.400,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.106.400,-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	30.160.900,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	17.298.900,-	Pengurangan belanja survey SKM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	5.029.958.122,-	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	5.029.958.122,-	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	4.862.382.954,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	5.029.045.122,-	Penambahan belanja gaji untuk PPPK
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	913.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	913.000,-	
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	185.180.300,-	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	185.180.300,-	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	134.270.500,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	131.509.900,-	
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	53.700.400,-	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	53.670.400,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	235.084.100,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	235.084.100,-	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.113.600,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.113.600,-	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	17.451.200,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	17.451.200,-	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5.960.500,-	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5.960.500,-	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan ogistic kantor yang disediakan	12 paket	13.500.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan ogistic kantor yang disediakan	24 paket	13.500.000,-	
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	7.507.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24 paket	7.517.800,-	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000,-	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	180.145.500,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	180.141.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	89.646.300,-	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	121.059.900,-	
5.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	10.673.200,-	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	89.646.300,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9 unit	110.386.700,-	Penambahan pengadaan peralatan & mesin
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	159.779.124,-	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	159.779.124,-	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,-	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	93.984.600,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	93.276.000,-	
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	333.070.300,-	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	333.070.300,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	278.288.200,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	288.277.300,-	
7.2	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	1.800.000,-	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1.800.000,-	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	18.601.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	18.513.000,-	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	24.480.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	24.480.000,-	
II.	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	96,89 %	5.285.612.302,-	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	96,89 %	5.285.612.302,-	
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	96,39 %				Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	96,39 %		
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	4.505.227.611,-	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	4.505.227.611,-	
			Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	20 %				Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	20 %		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pencegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1842 kasus	2.694.946.771,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Pencegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1842 kasus	2.694.946.771,-	
1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	1785 kasus	44.329.928,-	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	1785 kasus	44.329.928,-	
1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 dokumen	50.449.963,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 dokumen	304.606.310,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	23.681.500,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1.318.195.194,-	
1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	96.294.200,-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	116.817.208,-	
1.6	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 dokumen	25.000.000,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 dokumen	24.985.000,-	
1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	0,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 laporan	1.347.200,-	
2.	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada</i>	<i>100 %</i>	<i>770.023.491,-</i>	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada</i>	<i>100 %</i>	<i>770.023.491,-</i>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 laporan	482.498.342,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 laporan	326.637.300,-	
2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	10.894.934,-	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	10.894.934,-	
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	432.491.257,-	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	432.491.257,-	
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	-	0,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100 %	10.361.200,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-	0,-	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	10.361.200,-	
III.	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	516.838.700,-	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	516.838.700,-	
1.	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</i>	<i>100 %</i>	<i>44.802.800,-</i>	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</i>	<i>100 %</i>	<i>44.802.800,-</i>	
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.900.000,-	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.900.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	14.528.000,-	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	14.528.000,-	
1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	3.400.000,-	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	3.400.000,-	
1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 unit	9.183.200,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	23 unit	9.183.200,-	
1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	-	0,-	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	10.791.600,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi</i>	<i>100 %</i>	<i>298.603.100,-</i>	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi</i>	<i>100 %</i>	<i>298.603.100,-</i>	
2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	292.862.900,-	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	292.862.900,-	
2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.740.200,-	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.740.200,-	
3.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran</i>	<i>20 %</i>	<i>173.432.800,-</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran</i>	<i>20 %</i>	<i>173.432.800,-</i>	
3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	173.432.800,-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	127.670.800,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-	0,-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	45.762.000,-	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam *Tabel 2.4* berikut .

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembinaan / sosialisasi / penanggulangan bencana kebakaran dan pengadaan APAR	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kelurahan se Kecamatan Sananwetan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	Pembinaan / sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran diakomodir sesuai dengan kemampuan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				Pengadaan APAR tidak diakomodir
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				
2.	Pengadaan hydran	-	❖ Kelurahan Bendogerit (RW 6) ❖ Kelurahan Sannwetan (17 RW) ❖ Kelurahan Plosokerep RT 04 RW 03	-	-	Tidak Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “.Untuk menterjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional, yakni:

- a. Prioritas Nasional 1:
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- b. Prioritas Nasional 2 :
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- c. Prioritas Nasional 3:
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- d. Prioritas Nasional 4:
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- e. Prioritas Nasional 5:
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. Prioritas Nasional 6 :
Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Prioritas Nasional 7:
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2024 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target	
			2023	2024
1.	Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87%	5,92 %
1.1	Sasaran : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	6,40%	8,68 %

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target	
			2023	2024
2.	Tujuan : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,58	0,60
2.1	Sasaran : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	91%	92 %
3.	Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25	85,35
3.1	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25	85,35

3.3 Program dan Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2024 adalah 3 program,13 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana *Tabel 3.2* berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Mendukung sasaran meningkatnya kinerja perangkat Daerah
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	100 %	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	

(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 paket	
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	
Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	24 paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 laporan	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	3 unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	

(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	96,89 %	Mendukung sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	96,39 %	
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti</i>	100 %	
	<i>Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum</i>	20 %	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1842 kasus	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1785 kasus	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	

(1)	(2)	(3)	(4)
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 dokumen	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada</i>	100 %	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 laporan	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	
<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan</i>	100 %	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	Mendukung sasaran meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</i>	100 %	
Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	23 unit	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	12 orang	
<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi</i>	100 %	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 dokumen	
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	
<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran</i>	20 %	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa / kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	7 desa / kelurahan	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2024 dan pagu indikatif tahun 2024 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2022 pada Renja Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/Kota
2	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; Penyusunan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3	Peningkatan pemahaman /kesadaran masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Memberikan sosialisasi / bimbingan/penyuluhan pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Keg ; Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4	Meningkatkan kerjasama cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum bersama instansi terkait / lintas sektor	Melakukan patroli gabungan secara intensif dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; Penindakan atas gangguan atas ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
5	Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; 1. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum 2. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/Kota
6	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Peningkatan Pengetahuan & komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Kegiatan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8	Mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara edukatif dan humanis	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Sub Keg ; Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
9	Memperkuat pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia	Melaksanakan pengumpulan data pendukung capaian SPM secara akurat yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Sub Bab 3.3, Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						-		
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	81,75	6.084.537.148,-	APBD	-	81,75	6.321.447.161,40
1.05.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 %	20.405.300,-	APBD	-	100 %	38.652.084,38
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	10 dokumen	3.106.400,-	APBD	-	10 dokumen	3.146.673,38
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	7 laporan	17.298.900,-	APBD	-	7 laporan	35.505.411,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	<i>Kota Blitar</i>	100 %	5.029.958.122,-	APBD	-	100 %	4.939.716.463,11
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Blitar	45 orang/bulan	5.029.045.122,-	APBD	-	45 orang / bulan	4.938.603.361,11
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	4 laporan	913.000,-	APBD	-	4 laporan	913.102,-
1.05.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	<i>Kota Blitar</i>	100 %	185.180.300,-	APBD	-	100 %	149.053.323,05
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	7 paket	131.509.900,-	APBD	-	7 paket	120.315.378,-
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	45 orang	53.670.400,-	APBD	-	45 orang	28.737.945,05
1.05.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	<i>Kota Blitar</i>	100 %	235.084.100,-	APBD	-	100 %	219.079.575,-
1.05.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	1 paket	5.113.600,-	APBD	-	1 paket	5.138.535,-
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	3 paket	17.451.200,-	APBD	-	3 paket	15.948.790,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	5 paket	5.960.500,-	APBD	-	5 paket	5.971.637,-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	24 paket	13.500.000,-	APBD	-	24 paket	16.921.100,-
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	24 paket	7.517.800,-	APBD	-	24 paket	7.509.413,-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar	24 dokumen	5.400.000,-	APBD	-	24 dokumen	5.400.000,-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	46 laporan	180.141.000,-	APBD	-	46 laporan	162.190.100,-
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	121.059.900,-	APBD	-	100 %	197.152.065,86
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	Kota Blitar	3 unit	10.673.200,-	APBD	-	3 unit	15.000.000,-
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar	9 unit	110.386.700,-	APBD	-	9 unit	182.152.065,86
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	159.779.124,-	APBD	-	100 %	253.943.450,-
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	66.503.124,-	APBD	-	24 laporan	73.337.250,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	36 laporan	93.276.000,-	APBD	-	36 laporan	180.606.200,-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	333.070.300,-	APBD	-	100 %	523.850.200,-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Blitar	30 unit	288.277.300,-	APBD	-	30 unit	474.312.900,-
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar	5 unit	1.800.000,-	APBD	-	6 unit	1.984.000,-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	34 unit	18.513.000,-	APBD	-	34 unit	20.564.100,-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	2 unit	24.480.000,-	APBD	-	2 unit	26.989.200,-
1.05.02	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Kota Blitar	96,89 %	5.285.612.302,-	APBD	-	98,14 %	11.177.523.152,34
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		96,39 %				97,71 %	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	4.505.227.611,-	APBD	-	100 %	10.745.946.452,34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum</i>		20 %				20 %	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	1842 kasus	2.694.946.771,-	APBD	-	1632 kasus	9.576.100.630,76
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Blitar	1785 kasus	44.329.928,-	APBD	-	1602 kasus	48.878.720,-
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 dokumen	304.606.310,-	APBD	-	12 dokumen	398.959.890,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	1 dokumen	1.318.195.194,-	APBD	-	1 dokumen	518.584.000,-
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar	45 orang	116.817.208,-	APBD	-	45 orang	179.402.000,-
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kota Blitar	1 dokumen	24.985.000,-			1 dokumen	5.250.000,-
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Blitar	1 laporan	1.347.200,-			1 laporan	2.100.000,-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Kota Blitar	100 %	770.023.491,-	APBD	-	100 %	428.276.700,-
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kota Blitar	1 laporan	326.637.300,-	APBD	-	1 laporan	72.601.400,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	12 laporan	10.894.934,-	APBD	-	12 laporan	12.011.600,-
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Blitar	12 laporan	432.491.257,-	APBD	-	12 laporan	343.663.700,-
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	100 %	10.361.200,-	APBD	-	100 %	3.300.000,-
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Blitar	2 laporan	10.361.200,-	APBD	-	2 laporan	3.300.000,-
1.05.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Kota Blitar	100 %	516.838.700,-	APBD	-	100 %	1.727.959.400,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Kota Blitar	100 %	44.802.800,-	APBD	-	100 %	1.006.737.550,-
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Blitar	1 dokumen	6.900.000,-	APBD	-	1 dokumen	7.608.930,-
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 laporan	14.528.000,-	APBD	-	12 laporan	16.049.900,-
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	12 dokumen	3.400.000,-	APBD	-	12 dokumen	3.783.700,-
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Blitar	23 unit	9.183.200,-	APBD	-	23 unit	968.795.020,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Blitar	12 orang	10.791.600,-	APBD	-	12 orang	10.500.000,-
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Kota Blitar	100 %	298.603.100,-	APBD	-	100 %	338.784.050,-
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Blitar	1 dokumen	292.862.900,-	APBD	-	1 dokumen	322.635.200,-
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	1 dokumen	5.740.200,-	APBD	-	1 dokumen	16.148.850,-
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	Kota Blitar	20 %	173.432.800,-	APBD	-	100 %	382.437.800,-
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Blitar	140 orang	127.670.800,-	APBD	-	140 orang	191.218.900,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa / kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kota Blitar	7 desa / kelurahan	45.762.000,-	APBD	-	7 desa / kelurahan	191.218.900,-
JUMLAH TOTAL					11.886.988.148,-				19.226.929.713,74

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2024;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya
3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.